

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Perbanyak Mesin Parkir Meter untuk Antisipasi Jukir Liar

Perintah DKI Jakarta diminta memperbaiki dan memperbanyak mesin parkir meter di sejumlah ruas jalan yang menerapkan parkir on the street atau parkir di badan jalan.

Hal tersebut dapat meminimalisasi menjamurnya juru parkir (jukir) liar di beberapa bahu jalan.

"Sebagai upaya kita untuk melakukan penertiban terhadap parkir-parkir on the street yang ilegal," kata Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail yang dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Selain itu, Ismail juga meyakini optimalisasi mesin parkir meter akan berdampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pajak parkir.

Apalagi penerapan parkir meter bukan hal baru bagi Pemprov DKI, karena beberapa tahun sebelumnya sudah pernah diterapkan.

"Kami mendukung ke arah sana karena ini potensi pendapatan dan berdasarkan kajian kasar potensinya cukup besar," ujar Ismail.

Sedangkan Anggota Komisi B Suhud Alynudin menyayangkan mesin parkir meter tidak dirawat (maintenance) dengan baik. Akibatnya, banyak mesin yang sudah tidak berfungsi.

Kondisi demikian dimanfaatkan oleh Jukir liar dengan memungut tarif parkir. Artinya, perilaku tersebut tidak menghasilkan

ke kas daerah.

"Karena ada beberapa alat bayar parkir itu yang rusak, seperti di (jalan) Sabang, tapi ada beberapa yang tidak berfungsi," ungkap Suhud.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya sedang melakukan berbagai upaya peningkatan layanan di parkir on street dan parkir off street berbasis digital.

Selain itu, sambung Syafrin, pihak mulai menerapkan sistem pembayaran secara non-tunai (cashless).

"Seperti di depan Balai Kota untuk Lapangan IRTI, kami sudah menerapkan cashless. Jadi tidak ada lagi cash, semua pakai kartu dan QR," ungkap Syafrin.

Selain itu, sepanjang tahun 2023, Dishub juga gencar melakukan pengawasan dalam rangka menertibkan lokasi parkir swasta yang sudah habis masa berlaku izin parkir. Karena itu, ada kenaikan penerimaan denda izin parkir.

Dengan demikian, pendapatan BLUD UP Perparkiran dari pendapatan lain-lain yang sah dari target Rp 306 juta terealisasi Rp 778 juta atau mencapai 254,9 persen.

"Sejak 2023, kami fokus bagaimana pengawasan penyelenggaraan parkir swasta, ternyata ada peningkatan dari sesi pendapatan parkir-parkir swasta yang kemudian mereka belum mengantongi izin," pungkasnya. (faf)



Dok DPRD DKI